

## STRATEGI KOMUNITAS GUSDURIAN MOJOKERTO DALAM MEMEDIASI PENYELESAIAN KASUS PENOLAKAN MAKAM WARGA NON-MUSLIM

Ulthufna Kausarul Fitriya

16040254046 (S1-PPKn, FISH UNESA) ulthufnafitriya16040254046@mhs.unesa.ac.id

Sarmini

0008086803 (S1-PPKn, FISH UNESA) sarmini@unesa.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim beserta faktor pendorong dan penghambat Komunitas Gusdurian dalam melakukan strategi mediasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan empat tahapan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pilihan strategi yang dilakukan Komunitas Gusdurian: pertama, strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik meliputi membuat rilis bantuan dukungan terhadap nasib keluarga Kristen melalui media sosial *facebook* dan penyebarluasan berita melalui kolaborasi dengan media massa *online*. Kedua, strategi membangun kerjasama penyelesaian kasus meliputi upaya Komunitas Gusdurian menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontrass. Ketiga, strategi Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi meliputi tawar-menawar kepentingan antara pihak keluarga non-muslim, pemerintah desa, tokoh agama Islam desa dan Komunitas Gusdurian, memberikan saran berupa membuat PERDES tentang TPU dan menerima hasil keputusan pemindahan jenazah di TPU Desa. Hasil penelitian ini mempertegas teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser mengenai adanya fungsi positif dari sebuah konflik penolakan makam yaitu berupa pembangunan TPU di Desa Ngares Kidul sebagai upaya strategis untuk mencari jalan keluar dalam pemecahan masalah melalui mediasi.

**Kata Kunci:** Komunitas Gusdurian, Kasus Makam, Mediasi, Lewis Coser

### Abstract

The purpose of this study is to describe the strategy of the Gusdurian Community in mediating the resolution of the case of the rejection of the grave of non-Muslim citizens as well as the driving and inhibiting factors of the Gusdurian Community in conducting a mediation strategy. The research method uses a qualitative approach with case study design. Data collection techniques using in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques using the model of Miles and Huberman with four stages ranging from data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that there were three choices by the Gusdurian Community: first, the Gusdurian Community strategy in building public opinion included making the release of support for the fate of Christian families through Facebook social media and disseminating news through collaboration with online mass media. Second, the strategy to build a joint case settlement includes the efforts of the Gusdurian Community to contact the police and establish communication with LBH Kontrass. Third, the Gusdurian Community's strategy in conducting negotiations includes bargaining of interests between non-Muslim family parties, village government, village Islamic religious leaders and the Gusdurian Community, providing advice in the form of making a PERDES on TPU and accepting the decision to move bodies in TPU Village. The results of this study reinforce the conflict theory proposed by Lewis Coser regarding the positive function of a grave rejection conflict in the form of the construction of a TPU in Ngares Kidul Village as a strategic effort to find a solution in solving problems through mediation.

**Keywords:** Gusdurian Community, Grave Case, Mediation, Lewis Coser

### PENDAHULUAN

Permasalahan sosial dalam suatu masyarakat membutuhkan strategi untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah sosial membutuhkan peran aktif

dari setiap komponen masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat. Komunitas Gusdurian merupakan bagian dari suatu masyarakat yang memiliki andil untuk mensosialisasikan

wawasan kebhinekaan, toleransi, anti diskriminasi dan Hak Asasi Manusia, (Bastomi, 2019: 535). Komunitas Gusdurian tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sebagai bentuk nyata Komunitas Gusdurian Jombang menjalankan beberapa strategi untuk mendorong eksistensi berupa kampanye kegiatan Komunitas Gusdurian Jombang melalui media sosial, menjalin relasi dengan pihak kepentingan seperti GKI (Gereja Kristen Indonesia), dan mengadakan kegiatan kaderisasi seperti advokasi, diskusi dan aksi peduli pada isu nasional, (Farida, 2016: 130).

Di Kota Surabaya, Komunitas Gusdurian Surabaya mengimplementasikan nilai-nilai multikultural pada masyarakat Surabaya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya konflik di masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera. Penelitian ini dianggap relevan karena subjek yang diteliti memiliki kesamaan yakni Komunitas Gusdurian. Hal yang berbeda adalah objek yang diamati dari Komunitas gusdurian, dalam penelitian seelumnya mengambil tema implementasi nilai multikultural yang dilihat dengan kegiatan-kegiatan sosial yakni (1) Aksi menyalakan seribu lilin. (2) Bakti Sosial. (3) Penghormatan Perayaan Umat Beragama, (4) Sosialisasi melalui media sosial dan (5) Grup media sosial, (Putri, 2018: 129).

Di Kota lain, Komunitas Gusdurian Malang dalam hal mempromosikan kerukunan umat beragama kunci nya adalah melalui dialog, dialog dilakukan dengan 5 cara yakni menulis, komunikasi intens, silaturahmi lintas iman, kajian lintas iman, dan jejaring dengan komunitas maupun pribadi, (Haq, 2016: 62). Upaya Komunitas Gusdurian dalam mensosialisasikan kerukunan beragama ini sebagai wujud meneruskan perjuangan Gus-Dur dalam mempertahankan kebhinekaan dan pluralisme di Indonesia, (Setiawan, 2018: 463). Upaya Komunitas Gusdurian dalam mensosialisasikan kerukunan beragama didasarkan pada adanya keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Adanya jumlah penduduk yang besar diiringi dengan kondisi wilayah negara yang luas, menjadikan masyarakat Indonesia beragam. Keberagaman yang ada menjadi ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.. Ribuan pulau menunjukkan beragamnya etnis dan suku yang tinggal di negara ini. Orang Indonesia bicara dengan lebih dari 525 bahasa dan dialek. Total populasi Indonesia berdasar pada sensus 2010 adalah 237 juta jiwa, yang terdiri 87,18% Muslim, 6,96% Protestan, 2,91 Katholik, 1,69 Hidu, 0,72 Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13 lain-lain (Indiyanto, 2013: 14).

Kondisi keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia di atas memerlukan sebuah alat pemersatu bangsa yang dijadikan sebagai pedoman dan prinsip dalam melandasi kehidupan di atas perbedaan

yang ada. Di Indonesia, Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” merupakan sebuah prinsip sekaligus alat pemersatu bangsa ditengah keberagaman yang ada, (Muawanah, 2018: 67). Semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana adanya semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini diharapkan masyarakat benar-benar menghayati bahwasannya perbedaan yang ada bukan menjadi persoalan untuk tetap bersatu menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia telah memberikan kebebasan untuk memilih/memeluk agama yang merupakan wujud dari terselenggaranya demokrasi dan hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya, (Riuh, 2003: 139). Perbedaan latar belakang yang ada apabila tidak di landasi oleh sikap toleransi yang baik, tindakan diskriminasi sangat memungkinkan terjadi. Adanya kondisi mayoritas dan minoritas ini dapat mendorong konflik horizontal khususnya agama. Unsur agama merupakan suatu hal yang krusial dan sensitif di mata masyarakat Indonesia, (Sarkadi dkk, 2019:7). Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan keyakinan sebetulnya telah banyak memberikan sumbangsih besar bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Akan tetapi, karena pengetahuan dan kedewasaan masyarakat yang kurang mengenal toleransi, persoalan agama justru kerap menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal. Agama menjadi hal yang sensitif karena adanya isu mayoritas-minoritas dapat mendorong sikap diskriminatif terhadap perbedaan (Digdoyo, 2018: 47).

Di Indonesia pelanggaran atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas tampak makin meningkat, terutama terhadap kelompok minoritas agama, (Fadhli, 2014:357). Buktinya adalah perjuangan Gus Dur dalam masa pemerintahannya untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas di negeri ini yaitu kaum minoritas Cina. Keputusan Gus Dur dalam mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967, dimana Inpres tersebut merupakan aturan yang berusaha membatasi agama, kepercayaan, bahasa dan adat istiadat etnis minoritas keturunan Cina di Indonesia. Gus Dur juga bahkan menjadikan hari raya Imlek sebagai hari libur fakultatif. Lebih dalam, Gus Dur juga membuat langkah besar dengan upaya pengakuan Kong Hu Chu sebagai agama resmi di republik ini, serta masih banyak sikap politik beliau yang begitu condong pada pemenuhan hak-hak minoritas dan kesetaraan hak asasi manusia di Indonesia, (Musa, 2010: 65)

Masalah mayoritas dan minoritas serta perbedaan doktrin merupakan beberapa penyebab timbulnya diskriminasi berdasarkan agama, (Rumagit, 2013: 59).

Masalah mayoritas dan minoritas ini timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kelompok mayoritas dari pada kelompok minoritas sehingga timbul konflik yang tak terelakan. Dikarenakan saling menunjukkan pembenaran dari masing-masing pemahaman dari doktrin-doktrin yang di berikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas. Mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

Terdapat dua upaya untuk menghapus praktik sikap diskrimatif diantaranya yang pertama adalah advokasi atas sejumlah kebijakan negara yang masih dirasa belum adil. Upaya kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai kesetaraan, kebebasan, cinta tanah air dan toleransi antar umat beragama, (Burhani, 2019: 73). Keberagaman yang ada mengilhami hadirnya kelompok masyarakat yang disebut Gusdurian yakni sekumpulan murid, pengagum pemikiran sosok tokoh yang dijadikan inspirasi yakni Gus Dur dalam meneruskan perjuangan Gus Dur untuk menjunjung tinggi kebhinekaan, hak asasi manusia dan mengedepankan toleransi serta meredam isu-isu sentimen antar agama.

Isu sentiment agama relevan dengan fakta permasalahan yang ada di lapangan. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Februari terjadi sebuah peristiwa yang mencerminkan adanya perilaku diskriminatif berlatar belakang agama. Peristiwa yang terjadi adalah kasus penolakan makam yang dialami oleh keluarga ibu Nunuk Suartini (63) warga desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang meninggal pada tanggal 14 Februari 2019. Pihak keluarga telah meminta izin kepada Kepala Desa Ngares dan beberapa warga setempat agar jenazah Nunuk Suartini dapat dikuburkan di pemakaman desa. Langkah tersebut dilakukan karena sadar bahwa keluarga ibu Nunuk adalah satu-satunya keluarga non-muslim (Kristen) di desa Ngares Kidul.

Hal yang menjadi polemik dalam kasus ini adalah pihak keluarga telah mendapatkan izin dari pemerintah desa untuk memakamkan jenazah ibu Nunuk ke tempat pemakaman desa Ngares Kidul. Akhirnya jenazah dimakamkan sehari setelah meninggal yakni pada tanggal 15 Februari 2019. Namun sehari setelah pemakaman dilakukan, beredarlah surat penolakan diduga berasal dari warga. Isinya, meminta agar kuburan ibunya dipindahkan. Alasannya, pemakaman tersebut milik orang Islam, hasil tanah wakaf orang Islam bukan milik desa. Kuburan orang Islam tidak bisa dicampur agama lain. Adanya edaran surat penolakan ini menyebabkan ancaman dibongkarnya makam ibu Nunuk, untuk dipindahkan ke tempat pemakaman Kristen desa sebelah atau kemungkinan terburuk yakni dimakamkan di halaman belakang rumah keluarga ibu Nunuk. (Sumber:

Postingan *facebook* Akun Gusdurian Moker pada 20 Februari 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas, nampak bahwasannya tindakan diskriminasi masyarakat telah terjadi bahkan sampai pada masyarakat desa. Mestinya jenazah ibu Nunuk boleh dimakamkan di pemakaman Desa Ngares Kidul, mengingat makam tersebut adalah makam desa bukan makam muslim warga Desa Ngares Kidul. Faktanya beberapa warga yang melakukan penolakan atas dasar pengakuan bahwa makam desa adalah tanah wakaf, tidak dapat menunjukkan bukti secara tertulis bahwasannya makam desa adalah makam wakaf untuk orang Islam. Sebagai warga negara, keluarga ibu Nunuk memiliki hak untuk mengubur jenazah di tempat pemakaman desa, karena keluarga almarhumah adalah bagian dari masyarakat desa Ngares Kidul. Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hak atas warganya. Adanya surat penolakan makam yang diduga berasal dari warga ini seharusnya tidak menjadi sebuah tekanan kepada pemerintah desa, karena pemerintah Desa telah memutuskan untuk memberikan izin bahwasannya jenazah boleh dimakamkan di tempat pemakaman Desa Ngares Kidul.

Namun, adanya surat penolakan makam ini justru menyebabkan ancaman dibongkarnya makam ibu Nunuk untuk dipindahkan ke tempat lain. Faktanya Pemerintah Desa tidak bisa bertindak tegas kepada masyarakat terkait masalah yang ada. Pemerintah desa dinilai tidak kuat untuk menahan tekanan dari warga, sehingga dijadikan inisiasi oleh pihak lain salah satunya yakni kelompok Gusdurian yang turut berjuang dalam meneruskan perjuangan Gus Dur salah satunya yakni membela kelompok minoritas dengan mengedepankan toleransi, penegakan hak asasi manusia, prinsip kebhinekaan dan anti diskriminasi.

Beberapa alasan memilih Komunitas Gusdurian dalam penelitian ini adalah *pertama*, misi dari Gusdurian adalah Nilai, Pemikiran, Perjuangan Gus Dur tetap hidup dan mengawal pergerakan kebangsaan Indonesia; melalui sinergi karya para pengikutnya, dilandasi 9 Nilai Utama Gus Dur: Ketahuhan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Kesatria dan Kearifan Tradisi. *Ketiga*, yakni aktivitas Gusdurian adalah (1) Sillaturrahmi/ Aliansi, (2) Kaderisasi, (3) Forum Diskusi, (4) Kampanye dan (5) Advokasi. Berdasarkan pada ketiga hal tersebut penelitian ini memiliki urgensi yakni untuk mendeskripsikan mengenai strategi Gusdurian sebagai kelompok anti diskriminasi dalam memediasi penyelesaian konflik antara pihak keluarga (non-muslim) dengan beberapa warga tokoh-tokoh agama Islam dalam



kasus penolakan makam warga non-muslim di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Mediasi dianggap sesuai karena salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian adalah advokasi. Kaitan dengan konsep pendidikan kewarganegaraan yakni sebagai seorang warga negara yang baik, keberagaman yang ada harus dihayati sebagai anugerah dari Tuhan YME kepada bangsa Indonesia, bahwasannya keberagaman harus disikapi dengan senantiasa saling menghargai atas perbedaan, bersikap toleransi dan selalu berjuang dalam menjunjung tinggi kebhinekaan untuk persatuan Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab ketika terdapat permasalahan seperti kasus penolakan makam ini, menjadi tanggung jawab semua masyarakat untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penelitian ini dicermati dari perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser (Ritzer, 2004). Lewis Coser yang mendasarkan analisisnya tentang *"The Functions Of Conflict"*. Dalam memandang konflik Coser memiliki beberapa konsep diantaranya: (1) Fungsi Positif Konflik, (2) *Superordinate Goals*, (3) Katup Penyelamat (*Safety Value*), (4) Jenis Konflik (Konflik Realistik dan Konflik Non Realistik) dan (5) Dinamika Ikatan antar Kelompok (*ingroup-outgroup*). Kelima konsep-konsep yang ada dalam teori konflik Lewis A Coser ini yang akan digunakan untuk menganalisis Strategi Komunitas Gusdurian dalam Memediasi Penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih didasarkan pada masalah yang diambil dalam penelitian ini berorientasi pada kasus penolakan makam warga non-muslim. Pendekatan studi kasus dipilih didasarkan pada masalah yang diambil dalam penelitian ini berorientasi pada kasus penolakan makam warga non-muslim. Sesuai dengan pendapat Creswell (2015: 135) penelitian studi kasus memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Bersifat kontemporer, berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dengan fenomena yang biasa terjadi.

Fokus penelitian ini adalah pilihan strategi yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam meliputi: (1) Strategi Membangun Opini Publik, (2) Strategi Membangun Kerjasama dan (3) Strategi dalam melakukan

negosiasi. Selain strategi, penelitian ini menganalisis tentang faktor pendorong dan faktor penghambat Komunitas Gusdurian dalam menjalankan strategi yang dilakukan. Subjek penelitian ini adalah pengurus Komunitas Gusdurian Mojokerto yang terlibat dalam proses mediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim, anak dari keluarga korban, sekretaris desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD) serta tokoh agama Desa Ngares Kidul. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Mojokerto, Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2020.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk mengambil data tentang: (1) strategi membangun opini publik meliputi data tentang: Membuat Rilis Bantuan Dukungan Terhadap Nasib Keluarga Kristen melalui Media Sosial *facebook*, serta data tentang Penyebarluasan berita melalui kolaborasi dengan media massa. Selanjutnya wawancara mendalam digunakan untuk mengambil data tentang (2) strategi membangun kerjasama penyelesaian kasus meliputi data tentang: Menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontrass. (3) Strategi Negosiasi meliputi: tawar menawar kepentingan antar pihak yang terlibat, memberikan saran pembuatan PERDES tentang TPU, menerima keputusan pemindahan jenazah menuju TPU Desa yang telah dibangun. Selain itu wawancara mendalam digunakan untuk mengambil data tentang faktor pendorong dan penghambat Komunitas Gusdurian dalam melaksanakan strategi. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang strategi membangun opini publik berupa dokumentasi postingan *facebook* Gusdurian serta dokumentasi media massa CNN dan VOA.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246). Pertama, pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam kepada informan serta disertai dengan dokumentasi-dokumentasi yang mendukung. Kedua, data yang diperoleh direduksi dengan menentukan fokus data sesuai indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi: (1) Strategi membangun opini publik meliputi data tentang: Membuat Rilis Bantuan Dukungan Terhadap Nasib Keluarga Kristen melalui Media Sosial *facebook*, serta data tentang Penyebarluasan berita melalui kolaborasi dengan media massa. Selanjutnya wawancara mendalam digunakan untuk mengambil data tentang (2) Strategi membangun kerjasama penyelesaian kasus meliputi data tentang: Menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontrass. (3) Strategi Negosiasi meliputi:

tawar menawar kepentingan antar pihak keluarga (non-muslim), pihak pemerintah desa, tokoh agama Islam desa dan pihak Komunitas Gusdurian, memberikan saran pembuatan PERDES tentang TPU, menerima keputusan pemindahan jenazah menuju TPU Desa yang telah dibangun. Ketiga, menyajikan data dalam bentuk teks dan yang terakhir merupakan penarikan kesimpulan tentang Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Memediasi Penyelesaian Kasus Penolakan Makam Warga Non-Muslim Di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum dan penerus pemikiran Gus Dur. Para Gusdurian mendalami pemikiran Gus Dur, meneladani karakter dan prinsip nilainya, dan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh Gus Dur sesuai dengan konteks tantangan zaman. Isu strategi yang ditangani oleh Komunitas Gusdurian sebagaimana Gus Dur yang mendasarkan perjuangannya kepada nilai-nilai luhur, Komunitas Gusdurian tidak membatasi isu yang dikelola, sepanjang terkait dengan 9 nilai utama Gus Dur. Komunitas Gusdurian berkonsentrasi pada isu-isu promosi toleransi, demokrasi & kewargaan serta ekonomi rakyat.

Kasus penolakan makam yang terjadi di wilayah Mojokerto merupakan bagian dari isu strategi yang ditangani oleh Komunitas Gusdurian. Hal ini dikarenakan kasus penolakan makam dianggap sebagai hal yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Komunitas Gusdurian dalam meneruskan perjuangan Gus Dur. Oleh karena itu, Komunitas Gusdurian terlibat dalam menjalankan strategi untuk menyelesaikan kasus penolakan makam secara adil.

Strategi Komunitas Gusdurian dalam penelitian ini adalah pilihan-pilihan strategi yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim. Pilihan-pilihan strategi yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian diantaranya: (1) Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Membangun Opini Publik, melalui media sosial *facebook* dan media massa, (2) Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Membangun Kerjasama, dengan menghubungi pihak kepolisian daerah setempat dan melakukan komunikasi dengan organisasi lainnya yaitu LBH Kontrass. (3) Strategi Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi yaitu tawar menawar antar pihak yang terlibat, memberikan saran untuk penyelesaian kasus serta menerima hasil keputusan dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah desa Ngares Kidul.

## Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Membangun Opini Publik

Mempersiapkan dukungan masyarakat melalui strategi komunikasi dalam pembentukan opini publik merupakan hal penting yang perlu dilakukan manakala kita akan menciptakan suatu sudut pandang tertentu di masyarakat. Komunikasi massa sangat erat kaitannya dengan pembentukan opini publik ini. Penggunaan strategi yang tepat akan mempercepat proses pembentukan opini tersebut. Strategi komunikasi juga akan mempermudah adanya penyampaian informasi dan pesan dalam masyarakat. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat, maka tujuan dari komunikasi tersebut akan terlaksana dengan baik pula.

Strategi **pertama** yang dilakukan oleh Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik berupa dukungan melalui media sosial yaitu *facebook*. Media sosial juga bisa digunakan untuk semakin mempercepat penyebaran opini. Sebagaimana diketahui, media sosial sekarang ini bisa sangat efektif dalam menggiring masyarakat untuk memiliki suatu penilaian tertentu. Media sosial juga mungkin akan memberikan efek media massa. Penggunaannya dinilai bisa jauh lebih efektif karena masyarakat bisa merasa terlibat langsung dan “tersentuh” melalui media sosial. Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik yaitu memanfaatkan media sosial *facebook* berupa postingan-postingan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung Komunitas Gusdurian dalam membela nasib jenazah keluarga Kristen. Penjelasan tersebut didukung oleh yang disampaikan informan pengurus Gusdurian berikut:

“...strategi awal yang saya lakukan saat itu adalah membuat rilis postingan di *facebook*. Saya menulis kronologi permasalahan kasus penolakan makam ini untuk mengkampanyekan kepada masyarakat secara luas untuk turut membantu kami dalam memberi dukungan atas nasib keluarga non-muslim. ...” (Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).

Lebih lanjut, postingan *facebook* Komunitas Gusdurian memiliki tujuan untuk menegaskan HAM:

“...tujuan kami mengungkap kasus ini di social media adalah agar semua tahu syukur-syukur sampai kepada presiden atau paling tidak komnas HAM. Karena kita melihat ada sisi yang tidak manusiawi di sini...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Komunitas Gusdurian berkeyakinan bahwa kasus penolakan makam yang terjadi pada warga non-muslim dapat mengarah pada tindakan radikalisme:

“...menurut kami permasalahan penolakan makam ini dapat mengarah pada tindakan radikalisme, selain itu, berkat tulisan dalam postingan yang kami sebar di *facebook*, masyarakat dalam media



sosial banyak memberikan dukungan kepada kami intinya mereka menolak adanya tindakan yang mengarah radikalisme...”(Wawancara Kukun Triyoga 9 Maret 2020).

Data di atas bila dicermati dengan menggunakan perspektif teori konflik Lewis Coser dapat dianalisis dalam konsep tujuan tertinggi (*superordinate goals*). Tujuan tertinggi Komunitas Gusdurian melibatkan diri dalam mengatasi isu sentiment agama dengan membuat bantuan dukungan melalui postingan dalam media sosial *facebook* adalah untuk menegakkan hak asasi manusia dan menghindari permasalahan dari tindakan radikalisme. Membuat dukungan melalui media sosial dimaksudkan sebagai bentuk penegakan nilai kemanusiaan oleh Komunitas Gusdurian tidak hanya pada orang yang masih hidup bahkan kepada orang yang sudah meninggal masih diperjuangkan sisi kemanusiaannya. Opini publik yang berusaha dibangun Komunitas Gusdurian mendapat dukungan dari masyarakat secara luas untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara yang telah disepakati bersama yaitu mediasi.

Dalam perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Data dokumentasi yang tercantum pada postingan *facebook* Gusdurian Mojokerto dicermati dengan menggunakan konsep *superordinate goals*/ tujuan tertinggi Komunitas Gusdurian menekankan pada upaya penegakan kesetaraan dan keadilan. Penegakan kesetaraan dan keadilan ini ditunjukkan dengan membuat dukungan yang dituliskan melalui postingan *facebook* dengan judul “*Dulur-dulur monggo dibantu*”. Butuh dukungan: Dikubur dan terancam Dibongkar Nasib Jenazah Keluarga Kristen Di Ngares Kidul Gedeg Mojokerto. Uraian panjang pada tulisan tersebut berisikan kronologi kejadian disertai dengan pendapat anak bungsu keluarga Kristen.

Masyarakat dalam media social (*Netizen*) merespon dengan memberikan komentar positif dan membagikan postingan sebanyak 957 kali. Hal ini dapat dianalisis bahwasannya keberanian Komunitas Gusdurian untuk mengungkap isu sentiment berkaitan dengan agama melalui media sosial berupa *facebook*, dapat diserap oleh masyarakat nilai kesetiaan yang dimiliki oleh Komunitas Gusdurian. Masyarakat dalam media sosial juga memiliki keberanian untuk ikut andil membagikan postingan ini sehingga dukungan masyarakat dengan adanya media sosial ini semakin tinggi. Dukungan yang dimaksud adalah dukungan untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan keadilan.

Dapat disimpulkan bahwasannya strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik melalui media sosial *facebook* berupa meminta dukungan kepada masyarakat secara luas untuk mendorong keadilan bagi

keluarga non-muslim yang sedang mengalami sengketa atas kasus penolakan makam. Usaha yang dilakukan Komunitas Gusdurian dengan cara membuat postingan *facebook* untuk membela keluarga yang menjadi kelompok minoritas merupakan usaha yang dikenal dengan istilah *peacemaking* atau membuat kedamaian ditengah masyarakat.

Strategi penyelesaian konflik dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu konsiliasi atau kesepakatan bersama, mediasi yaitu perundingan dengan melibatkan pihak ketiga serta arbitrase yaitu penyelesaian konflik dengan jalur persidangan (Dahrendorf dalam Putra 2009:16). Strategi penyelesaian konflik juga dikenal dengan istilah resolusi konflik. Resolusi konflik yaitu suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik serta konstruktif. Model yang dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*, ketiga model ini saling berkesinambungan satu sama lain (Galtung dalam Jamil, 2007: 72). Strategi penyelesaian konflik yang terjadi pada kasus penolakan makam warga non-muslim di Desa Ngares Kidul Kecamatan Mojokerto ini diselesaikan dengan menggunakan cara mediasi atau perundingan dengan melibatkan pihak ketiga diantaranya adalah Komunitas Gusdurian Mojokerto.

Strategi *kedua* yang dilakukan Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik yaitu kolaborasi dengan pihak wartawan sebagai media massa untuk menampilkan berita-berita terkait kasus penolakan makam agar mendapat dukungan publik. Media massa bisa digunakan sebagai salah satu strategi komunikasi untuk membuat opini publik. Ragam dari media massa tersebut seperti misalnya iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui televisi, radio hingga internet sekalipun. Masyarakat yang sering terpapar dengan informasi tersebut lama kelamaan akan mulai membuat suatu opini. Peran media massa sangat penting untuk pembentukan opini publik, (Dhahir, 2019: 149). Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik yaitu menggunakan kolaborasi dengan pihak wartawan sebagai media massa untuk membuat berita-berita terkait kasus penolakan makam sesuai berdasarkan data wawancara berikut ini:

“...awalnya media massa yang pertama kali menuliskan berita penolakan makam ini adalah CNN. Kemudian kami memiliki relasi dengan teman wartawan kami dari media VOA yang ada di Surabaya...”(Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Lebih lanjut, pengurus Gusdurian lainnya memberikan keterangan yang berbeda dalam data wawancara sebagai berikut:

“...kami bekerja sama dengan media massa, baik media massa lokal maupun media massa nasional. Menurut saya media massa lokal yang cukup besar di daerah itu tidak cukup berani untuk menampilkan kasus ini, namun kemudian ada detik.com dan kompas.com yang mau menayangkan itu...”(Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).

Berbeda lagi dengan data yang disebutkan oleh pengurus Gusdurian di atas. Data berikut menambahkan beberapa media massa lainnya yang turut menyebarkan berita dalam data berikut:

“...selain media sosial, saat itu media massa juga ikut menuliskan tentang kasus ini ada CNN, Detik.com Faktual news juga ikut mengangkat kasus ini dalam berita...”(Wawancara Kukun Triyoga 9 Maret 2020).

Konsep *superordinate goals* dalam strategi membangun opini publik oleh Komunitas Gusdurian memperjelas bahwasannya penyebaran berita terkait kasus penolakan makam dalam rangka membangun dukungan opini publik dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh Komunitas Gusdurian serta menyebarkan berita dengan berkolaborasi dengan media beberapa massa. Media sosial maupun media massa digunakan oleh Komunitas Gusdurian Mojokerto sebagai sarana untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat dalam usaha membuat suatu opini yaitu agar masyarakat mendukung nasib keluarga non-muslim yang terancam pembongkaran makam oleh oknum masyarakat.

Data-data pada dokumentasi yang disajikan oleh media massa menuliskan secara garis besar mengenai kronologi peristiwa penolakan makam warga Kristen. Data yang disajikan oleh media massa bersumber pada keterangan yang diberikan secara langsung oleh Komunitas Gusdurian Mojokerto. Keterangan penyebaran berita melalui media massa yang disebutkan oleh informan sebelumnya didukung dengan adanya data dokumentasi beberapa media massa yang turut menuliskan berita terkait kasus penolakan makam yang terjadi di Mojokerto seperti data media CNN, VOA, Kompas, detik, dan faktualnews.

Pada tanggal 21 Februari 2020, tiga media massa menuliskan berita tentang kasus penolakan makam yang terjadi di Desa Ngares Kidul ini secara bersamaan. Tiga media massa tersebut adalah CNN, Detik.com dan Faktualnews. CNN menuliskan judul berita “Jenazah Ditolak Warga, Keluarga Tunggu Ada Makam Non-Muslim”. Data dokumentasi berita yang dituliskan CNN pada tanggal 21 Februari 2019 menyebut Koordinator Gusdurian Mojokerto sebagai sumber informan. Berita yang disajikan oleh CNN ini memuat informasi mengenai kronologi sengketa penolakan makam warga non-muslim yang isinya tidak jauh berbeda dengan postingan *facebook* Komunitas Gusdurian sehari sebelumnya tepatnya pada

tanggal 20 Februari 2019, (Sumber: CNNIndonesia.com 21022019)

Pada hari yang sama Detik.com juga menuliskan berita yang berjudul “Beda Keyakinan Makam Seorang Warga Di Mojokerto Harus Di Relokasi”. Tulisan yang disajikan oleh detik.com memuat keterangan yang bersumber pada narasumber anak kedua dari almarhumah yang bernama Roni. Sedangkan CNN dan faktualnews menjadikan Gusdurian sebagai narasumber. Dimana Gusdurian sendiri bersumber pada keterangan putri bungsu dari almarhumah, (Sumber: news.detik.com-2122019). Selanjutnya, faktualnews juga turut menuliskan berita di hari yang sama dengan judul “Hanya Karena Beda Agama Makam Seorang Perempuan di Mojokerto Bakal Dibongkar”. Data berupa berita yang disajikan oleh faktualnews tidak jauh berbeda dengan media massa lainnya yakni mengenai kronologi peristiwa penolakan makam hingga adanya proses kesepakatan yang digunakan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, (Sumber: faktualnews.com-20190221).

Selain CNN, data wawancara di atas juga menyebutkan media massa lainnya yaitu VOA (*Voice Of America*). Keterangan informan di atas mengenai media massa VOA juga dapat disajikan dalam bukti dokumentasi berita yang disajikan oleh VOA pada 22 Februari 2019. Dokumentasi dalam data media massa yang tertuang dalam berita VOA di atas berisikan tulisan dengan judul “Selesaikan Polemik Pemda Mojokerto Sediakan Makam Khusus Warga Non-Muslim”. Dalam berita yang ditulis oleh VOA memuat kronologi peristiwa sengketa penolakan makam disertai dengan data rekaman seorang aktivis Gusdurian Mojokerto yang kebetulan juga menjadi informan dalam penelitian ini, (Sumber: VOAIndonesia.com-21022019).

Data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunitas Gusdurian dalam melakukan strategi membangun dukungan opini publik terkait adanya kasus penolakan makam tidak hanya memanfaatkan media sosial saja melainkan juga berkolaborasi dengan media massa. Bila dicermati dengan perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser membangun opini publik, konsep *superordinate goals* berkaitan dengan implementasi nilai pembebasan. Nilai Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain.



### Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Membangun Kerjasama Penyelesaian Kasus

Strategi **pertama** yang dilakukan Komunitas Gusdurian dalam membangun kerjasama dimulai dengan melibatkan pihak aparat kepolisian setempat sebagai badan penegak hukum. Menghubungi aparat kepolisian merupakan bentuk interaksi antara Komunitas Gusdurian dengan pihak Polresta Mojokerto untuk mencapai tujuan bersama yakni menjaga keamanan dan mencapai keadilan dalam masyarakat yang sedang bermasalah. Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun kerjasama penyelesaian kasu dengan meghubungi aparat kepolisian dapat tercermin dalam hasil data wawancara berikut ini:

“...kebetulan saya memiliki nomor telepon pak kapolres karena sering terlibat dalam acara Gusdurian. Jadi sebelum mengunggah postingan mengenai dukungan di *facebook*, kami berinisiatif menambahkan *contact person* untuk menyalurkan dukungan masyarakat, disitu saya cantumkan nomor telepon saya, Kukun dan pak kapolresta Pak Sigit...”(Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Data yang disampaikan oleh informan di atas sejalan dengan penjelasan informan Gusdurian berikut ini:

“...berawal dari postingan *facebook* yang kami buat dengan mencantumkan nomor pak Kapolres, akhirnya kami Gusdurian ada saya, Maliki, dan mas Aan nah dipanggil ke Polresta untuk mediasi antara pihak Komunitas Gusdurian dengan pihak Kepolisian langsung dengan bapak Kapolresta Mojokerto saat itu...”(Wawancara Kukun Triyoga 9 Maret 2020).

Data di atas dianalisis dengan konsep katup penyelamat/ *savety value* dan konsep tentang jenis konflik dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Katup penyelamat dalam teori konflik Coser memberikan analisis bahwa adanya suatu konflik akan mendorong upaya penyelesaian dalam masyarakat. Upaya Komunitas Gusdurian menjalankan mediasi dengan pihak kepolisian setempat untuk menyelesaikan penyelesaian kasus penolakan makam merupakan wujud dari usaha mencari jalan keluar/ *savety value*. Komunitas Gusdurian melibatkan pihak kepolisian sebagai bagian dari badan penegak hukum untuk menjaga keamanan sekaligus sebagai upaya *peacekeeping* dalam mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan antar warga.

Selanjutnya, hal ini dapat dicermati dengan menggunakan konsep jenis konflik pada teori konflik Lewis Coser, bahwasannya kasus penolakan makam yang terjadi termasuk dalam jenis konflik realistik. Konflik realistik muncul sebagai akibat dari adanya kekecewaan terhadap keputusan Kepala Desa untuk memberikan ijin memakamkan jenazah non-muslim menjadi satu lokasi

dengan makam warga yang beragama Islam di Desa Ngares Kidul.

Hasil data dari wawancara informan-informan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun kerjasama adalah menghubungi aparat kepolisian sebagai langkah awal. Langkah ini digunakan sebagai upaya *peacekeeping* untuk menjaga keamanan ditengah warga Desa Ngares Kidul yang sedang ramai dengan kasus penolakan makam. Bila dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Gus-Dur kerjasama antara Komunitas Gusdurian dengan Aparat Kepolisian ini dapat dianalisis menggunakan nilai persaudaraan. Nilai Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Persaudaraan yang telah terbangun Komunitas Gusdurian dalam membangun relasi dengan aparat kepolisian menjadi dukungan Komunitas Gusdurian dalam menjalankan visi-misi yang berpedoman pada nilai-nilai utama Gus-Dur.

Sebagai sebuah strategi dalam membangun kerjasama, strategi **kedua** yang dilakukan Komunitas Gusdurian adalah melakukan komunikasi dengan sebuah lembaga yaitu LBH Kontrass Surabaya sebagai sarana antisipasi apabila penyelesaian kasus penolakan makam berakhir pada meja hijau. Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun komunikasi dengan LBH Kontrass dapat tercermin dalam hasil data wawancara berikut ini:

“...kami bekerjasama dengan Kontrass lebih mengarah pada wilayah hukum, jadi seandainya penyelesaian kasus penolakan makam ini berakhir di meja hiau maka teman-teman dari LBH Kontras siap membantu...”(Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Sejalan dengan data di atas, pengurus Gusdurian menambahkan bahwa keberadaan LBH Kontrass sebagai upaya penyelesaian kasus dengan jalur litigasi sesuai dengan data berikut ini:

“...Teman-teman dari LBH Kontrass hadir membantu penyelesaian kasus penolakan makam secara litigasi. Jadi, kami dari Gusdurian berusaha untuk memediasi dahulu kalau gagal bisa dilanjutkan dengan litigasi oleh temen-temen Kontrass...”(Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).

Data di atas dapat dianalisis menggunakan konsep jenis konflik realitis dalam pemikiran teori konflik Coser bahwasannya pada konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pilihan-pilihan amat bergantung pada penilaian partisipan



atas solusi yang selalu tersedia. Penilaian Komunitas Gusdurian sebagai salah satu partisipan dalam penyelesaian konflik menganggap bahwasannya mediasi merupakan pilihan yang bersifat fungsional dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Metode yang dipakai untuk menyelesaikan kasus penolakan makam telah mencapai hasil kesepakatan melalui mediasi. Namun keberadaan Kontrass sebagai lembaga bantuan hukum (LBH) masih belum selesai dikarenakan mencegah timbulnya gesekan apabila terdapat oknum yang tidak menerima hasil mediasi. Bila dikaitkan dengan implementasi nilai utama Gus-Dur. Hal ini merupakan usaha untuk menerapkan nilai persaudaraan yang ditunjukkan oleh Komunitas Gusdurian maupun LBH Kontrass. Kedua organisasi ini saling bahu membahu dalam membantu sesama saudara sebangsa dan setanah air tanpa membedakan latar belakang suku, agama maupun budaya.

Berdasarkan pemaparan informan-informan di atas dapat disimpulkan bahwasannya strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus juga melibatkan kerjasama baik dengan aparat kepolisian maupun organisasi lainnya yaitu LBH Kontrass yang siap untuk pasang badan dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan sejalan dengan usaha Komunitas Gusdurian.

### Strategi Komunitas Gusdurian Dalam Melakukan Negosiasi

Strategi **pertama** yang dilakukan Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi adalah tawar menawar dalam proses negosiasi adalah proses awal untuk mengumpulkan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat agar dapat dipahami dengan baik sehingga dapat menentukan saran yang dapat diimplementasikan, (Parmitasari, 2019: 57). Strategi Komunitas Gusdurian dalam melakukan proses tawar menawar dapat disajikan dalam hasil wawancara berikut ini:

“...saat perundingan kami menekankan kepada pihak pemerintah desa bahwasannya Negara harus hadir dalam upaya penegakan HAM...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Data dalam hasil wawancara di atas sejalan dengan pernyataan informan Gusdurian berikut ini:

“...saat perundingan saya berkomunikasi dengan Bapak Kapolresta saat itu bahwa saran saya kalau bisa jangan sampai dibongkar, kalaupun dibongkar pemindahannya tidak boleh keluar dari desa. Sebab kalau keluar dari desa, sampai kapanpun ini akan menjadi stigma yang diyakini bahwa orang non-muslim tidak boleh dimakamkan di desa itu dan itu tidak baik untuk Pancasila...” (Wawancara Aan Anshori 07 Maret 2020).

Lebih lanjut, pengurus Gusdurian lainnya menyatakan hal yang berbeda dengan informan sebelumnya. Hal ini

didukung oleh pernyataan informan Gusdurian lainnya berikut ini:

“...saya memberanikan diri untuk menegaskan intinya saya membela keluarga korban. Saya menuntut kepada pihak pemerintah desa untuk menyediakan tanah yang digunakan untuk TPU Desa. Jika sampai dibongkar secara paksa, pihak keluarga tidak rela, maka akan saya kasuskan...” (Wawancara Kukun Triyoga 09 Maret 2020).

Beberapa data yang disampaikan oleh Komunitas Gusdurian dapat dicermati dalam konsep *savety value* dalam teori konflik yang dikemukakan Lewis Coser. Konsep *savety value* tercermin dalam kegigihan Komunitas Gusdurian untuk mendorong upaya penegakan HAM. Kegigihan yang dimiliki oleh informan-informan dari Komunitas Gusdurian untuk menjembatani penyelesaian kasus penolakan makam dengan mengedepankan keadilan ini merupakan cerminan pelaksanaan nilai utama Gus-Dur yaitu nilai pembebasan. Nilai pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Dalam hal ini Komunitas Gusdurian berusaha untuk membebaskan kaum minoritas dari kaum mayoritas agar memperoleh hak yang sama.

Lebih lanjut proses tawar menawar kepentingan Komunitas Gusdurian diatas didukung oleh yang disampaikan putri bungsu dari pihak keluarga non-muslim sebagai berikut:

“...dari pihak keluarga, kami menghendaki untuk dipindah dengan beberapa syarat yaitu: (1) Dipindahkan secara layak, (2) Tidak keluar dari Desa Ngares Kidul, dan (3) Yang memindahkan dari tim ahli karena jenazah ini telah dimakamkan selama 3 minggu jadi sebaiknya yang menangani proses pemindahan tim ahli bukan dari masyarakat...” (Wawancara Novita 23 Maret 2020).

Hal ini mendapat tanggapan oleh pernyataan informan dari pihak pemerintah Desa Ngares Kidul berikut ini :

“...saat negosiasi saya sebagai Ketua BPD saat itu juga bilang kepada warga bahwasannya memang benar hak nya untuk dimakamkan di desa tapi masalahnya ditempatkan dimana. Sebenarnya kami pihak pemerintah desa sudah menanyakan dari dulu kalau meninggal dimakamkan dimana, pihak keluarga saat itu mengatakan sudah ada rencana untuk dimakamkan di Pagerluyung, jadi pemerintah desa tidak ada antisipasi. Kalau sejak dulu bilang belum ada tempat sasaran untuk pemakaman pihak pemerintah desa akan memfasilitasi dan sudah mempersiapkan...” (Wawancara Tulus 27 Maret 2020).

Konsep *savety value*/ upaya mencari jalan keluar dalam perspektif teori konflik Lewis Coser dari pihak

pemerintah desa adalah melakukan langkah antisipasi dengan menanyakan kepada pihak keluarga satu-satunya keluarga Non-Muslim terkait tempat pemakaman. Pemerintah desa disatu sisi mengedepankan hak warga untuk dimakamkan di Desa namun disisi lain pemerintah Desa juga mengalami desakan atas aspirasi sekelompok warga untuk meminta pemindahan secepatnya. Desakan warga untuk melakukan pemindahan didukung oleh pernyataan informan berikut ini:

“...saya berkeyakinan bahwa makam orang Islam tidak tentram bila dicampur dengan makam orang non-muslim. Hal ini ada pada kitab yang saya jadikan sumber hukum syariat islam yaitu kitab Mirqaus Su’ud Syarah Sulam Taufiq Karya Kiai Imam Nawawi Banten. Saya sadar bahwa pihak keluarga menginginkan untuk dimakamkan menjadi satu, hukum negara juga mendukung akan hal itu, namun yang menjadi masalah adalah pelaksanaan hukum syariat Islam bertentangan dengan hal itu...” (Wawancara Nur Said 30 Maret 2020).

Data di atas bila dicermati dengan perspektif teori konflik Lewis Coser menunjukkan bahwa konsep tentang jenis konflik mengarah pada konflik realistik. Aspirasi warga yang melakukan penolakan didukung oleh pemikiran tokoh agama Desa setempat. Adanya dukungan dari tokoh agama sebagai orang yang dianggap tahu sehingga dorongan masyarakat untuk melakukan penolakan semakin besar. Adanya pernyataan dari tokoh agama yang dilandaskan pada hukum syariat islam menjadikan sekelompok masyarakat yang mendukung penolakan makam warga non-muslim ini semakin besar. Dalam proses mediasi aparat kepolisian berperan sebagai penengah dapat memberikan keamanan agar tidak terjadi aksi dari warga yang tidak diinginkan hingga mencapai pada kesepakatan hasil keputusan mediasi.

Strategi **kedua** dalam proses negosiasi adalah memberikan saran yang dapat diimplementasikan. Dalam hal ini, Komunitas Gusdurian memberikan saran untuk menyelesaikan kasus penolakan makam dengan membuat peraturan desa (PERDES) tentang tempat pemakaman umum desa (TPU). Hal ini berdasarkan hasil data wawancara berikut ini:

“...saran yang kami berikan kepada pemerintah desa bahwasannya pemerintah desa bisa membuat PERDES tentang TPU. Jadi kami dan pihak keluarga korban menuntut Hak sebagai bagian dari warga desa untuk dicarikan tanah desa untuk keperluan TPU yang dikuatkan dengan PERDES...” (Data Primer: Wawancara Kukun Triyoga 7 Maret 2020).

Lebih lanjut pernyataan saran membuat PERDES dijadikan sebagai usulan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) sebagai berikut:

“...kita juga memberikan saran kepada PEMDA pada saat itu. Kita berharap dapat belajar dari kasus penolakan ini agar PEMDA membuat terobosan baik PERPU maupun PERDA bahwasannya setiap desa wajib memiliki makam umum bagi yang belum ada...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Data di atas dicermati dalam Teori Konflik Lewis Coser menggunakan *konsep safety value*/ jalan keluar dalam memecahkan masalah adalah memberi saran yang dianggap rasional dan adil dengan mengusulkan PERDES kepada pemerintah desa untuk membuat TPU. Usulan pembuatan PERDES tentang TPU bagi desa merupakan upaya solutif dari Komunitas Gusdurian dengan mengedepankan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Saran Komunitas Gusdurian untuk membuat PERDES tentang TPU dijadikan sebagai saran yang diteruskan kepada Pemerintah Daerah (Bupati) Mojokerto untuk dijadikan terobosan berupa PERPU ataupun PERDA terkait anjuran setiap desa untuk membuat TPU desa dengan dikuatkan oleh PERDES bagi yang belum ada. Adanya terobosan untuk menyediakan tempat pemakaman umum bagi setiap desa di Kabupaten Mojokerto menjadi sebuah cara yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat untuk mencegah konflik serupa terkait penolakan makam karena perbedaan keyakinan.

Strategi **ketiga** yang dilakukan Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi diakhiri dengan proses menerima hasil keputusan pemerintah Desa tentang pembuatan TPU. Beberapa tanggapan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim tentang keputusan Pemerintah Desa tentang pembuatan TPU terdapat dalam hasil wawancara dari beberapa pihak yang terlibat yaitu pihak Komunitas Gusdurian, Pihak keluarga non-muslim, pihak pemerintah desa dan pihak tokoh agama berikut ini:

“...menurut saya tanggapan pihak-pihak yang terlibat semuanya lapang dada menerima kesepakatan ini. Baik dari tokoh agama islam, pihak pemerintah desa dan yang paling penting pihak keluarga juga sangat legowo dengan hasil penyelesaian kasus ini yang berjalan dengan sangat baik menurut kami, atas peran besar dari bapak kapolresta pak sigit juga saat itu yang menjadi penengah yang adil sehingga semuanya saya rasa bisa lapang dada menerima keputusan ini...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Data di atas dapat dicermati dengan menggunakan Teori Konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser dengan menekankan analisa Coser mengenai konsep fungsi positif konflik. Menurut data di atas, konflik yang terjadi karena adanya penolakan makam warga non-muslim dapat memberikan efek positif bagi keteraturan masyarakat Desa Ngares Kidul yakni konflik ini

memberikan sumbangsih pembuatan tempat pemakaman umum (TPU) di tingkat desa.

### **Faktor Pendorong Komunitas Gusdurian Dalam Melakukan Strategi Mediasi**

Strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam dilatar belakangi oleh faktor-faktor pendorong Komunitas Gusdurian bersedia untuk terlibat dalam penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim yang ada di Ngares Kidul, kecamatan Gedeg kabupaten Mojokerto. Selain dilatar belakangi oleh faktor pendorong keterlibatan komunitas Gusdurian juga tentunya memiliki faktor-faktor yang menjadi penghambat strategi yang telah dilakukan oleh Komunitas Gusdurian dalam penyelesaian kasus penolakan makam ini.

Faktor Pendorong yang berasal dari dalam (internal) Komunitas Gusdurian adalah 9 Nilai Utama Gus Dur. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi mengenai faktor internal yang menjadi pendorong oleh Komunitas Gusdurian sebagai berikut:

“...faktor yang mendorong kami membantu penyelesaian masalah karena Visi dan Misi nya Gusdurian. Dimana didalam misi gusdurian yang terdapat 9 nilai teladan Gus Dur sebagai acuan dalam cara kerja kami untuk senantiasa membangun toleransi, mengatasi isu-isu mayoritas-minoritas seperti ini...” (Wawancara: Imam Maliki 27 Februari 2020).

Data di atas dicermati dalam perspektif teori konflik Lewis Coser dengan menggunakan konsep ikatan kelompok *ingroup* dan *out group*. Ikatan kelompok *ingroup* dalam Komunitas Gusdurian semakin kuat karena nilai-nilai filosofis yang dimiliki oleh Komunitas Gusdurian sebagai bentuk meneladani figur yang di idolakan yaitu Gus-Dur. Sembilan nilai utama Gus Dur meliputi Nilai Ketahuhan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Kesatria dan Kearifan Tradisi sebagai pedoman cara kerja Komunitas Gusdurian di seluruh Indonesia.

Faktor Pendorong yang berasal dari luar (eksternal) Komunitas Gusdurian yaitu faktor baik dari dalam individu seorang Gusdurian maupun dalam wadah organisasi Komunitas Gusdurian yang menjadi pendorong untuk terlibat dalam penyelesaian kasus penolakan makam. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi mengenai faktor eksternal yang menjadi pendorong oleh Komunitas Gusdurian sebagai berikut:

“...faktor eksternal yang mendorong kami melakukan penyelesaian masalah adalah pihak keluarga yang sangat kooperatif untuk bersedia dibantu oleh kami. Dan pihak kepolisian yang saya rasa dapat memahami usulan kami menjadi

solusi yang dapat diterima semua pihak...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Lebih lanjut, Penjelasan informan diatas juga sejalan dengan informan Gusdurian dibawah ini:

“...faktor pendorong pastinya pihak keluarga, masyarakat yang memberikan respon dukungan dengan menghubungi nomor telepon kami, teman-teman dari Gusdurian pusat di Jakarta juga siap datang ke Jawa Timur untuk menyelesaikan kasus ini...” (Data primer: Wawancara Kukun Triyoga 32 tahun).

Bila dikaitkan dengan teori konflik milik Coser adanya konflik atau permasalahan dalam masyarakat dapat membantu kohesi antar kelompok masyarakat. Fungsi konflik dalam hal ini dapat menambah solidaritas pada kelompok dalam (*in-group*) dengan pemikiran yang sama untuk menyelesaikan kasus penolakan makam. Solidaritas dalam kelompok *in-group* yaitu Komunitas Gusdurian memberikan hasil keputusan yang baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Desa Ngares Kidul tentang adanya TPU Desa yang dikuatkan dengan PERDES.

### **Faktor Penghambat Komunitas Gusdurian Dalam Melakukan Strategi Mediasi**

Pelaksanaan strategi tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa hambatan tertentu. Beberapa faktor penghambat Komunitas Gusdurian dalam memediasi kasus penolakan makam warga non-muslim yaitu faktor penghambat Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik, membangun kerjasama maupun melakukan negosiasi.

**Pertama**, faktor penghambat dalam membangun opini publik dapat berasal dari penfsiran individu atas opini yang berusaha untuk dibangun. Apabila individu tidak memiliki nilai-nilai yang sama maka opini publik tidak dapat dibangun dengan baik. Faktor penghambat strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik berdasarkan data hasil wawancara dengan informan penelitian berikut ini:

“...ya ada beberapa personal itu yang menyuruh kami untuk berhenti, ada juga yang menyuruh untuk menghapus postingan kita di *facebook* itu...” (Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Lebih lanjut, hambatan Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik adalah media massa lokal yang tidak bersedia menampilkan berita kasus penolakan makam.

“...jadi hambatannya juga ada di media massa. Media massa ini kami terbelah, karna media massa lokal yang besar disitu, setahu saya tidak mau menampilkan itu. Namun justru kami dibantu oleh media massa Nasional untuk mengungkapkan kasus itu...” (Data Primer: Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).



Lebih lanjut, hambatan dalam membangun opini publik adalah adanya penentangan dari aparat pemerintah setempat.

“...hambatannya dengan aparat pemerintah. Hambatannya saya agak ditentang biar kasus ini tidak merabab sampai ke tingkat nasional. Intinya, maunya diselesaikan secara internal jangan sampai masuk ke dunia media sosial biar tidak dibaca banyak orang agar tidak sampai menjadi isu nasional. Tapi nyatanya kasus ini sudah jadi isu nasional, karena CNN, Detik, sebagai media massa besar sudah tau dan konfirmasi dengan pihak kami saat itu...”(Data primer: Wawancara Kukun Triyoga, 9 Maret 2020).

Hal ini dapat dianalisis menggunakan konsep ikatan kelompok *in-group* dan *out-group* dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser bahwa hambatan penyelesaian kasus bagi Komunitas Gusdurian berasal dari *out-group* baik secara personal, aparat pemerintah maupun media massa. Hambatan ini membuat Komunitas Gusdurian berupaya untuk mencari jalan keluar yaitu dengan strategi negosiasi bersama pihak-pihak yang terlibat seperti pihak keluarga korban, pihak pemerintah desa dan pihak tokoh agama untuk menyelesaikan kasus penolakan makam yang ada di Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini.

**Kedua**, faktor penghambat dalam melakukan strategi kerjasama dapat terjadi apabila pihak yang bekerjasama tidak saling terbuka satu sama lain. Keterbukaan sangat penting dalam membangun kerjasama yang baik. Apabila tidak saling terbuka, terdapat kepentingan yang berbeda maka dapat menghambat proses pencapaian tujuan. Faktor penghambat strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun kerjasama berdasarkan data hasil wawancara dengan informan penelitian berikut ini:

“...ya hambatannya itu ya organisasi kemasyarakatan yang lain itu gak ada yang pasang badan. Cuman secara personal seperti pendeta A, pendeta B banyak yang memberi dukungan seperti itu, tapi secara kelembagaan tidak...” (Data primer: Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Lebih lanjut, kendala dalam membangun kerjasama adalah tidak semua kelompok masyarakat bersedia untuk bekerjasama dengan Komunitas Gusdurian.

“...kendala pasti ada namanya kita membangun kerjasama, tidak semua mau untuk diajak kerjasama. Sehingga ada penolakan dari sebagian warga juga, resistensi dari tokoh-tokoh agama, tapi kan dari kendala itu kita negosiasikan...”(Data Primer: Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).

Bila dikaitkan dengan konsep ikatan kelompok *in-group* dan *out group* dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Coser hambatan yang terjadi dalam menjalankan strategi kerjasama juga berasal dari

kelompok diluar Komunitas Gusdurian. Dalam data di atas menjelaskan bahwa tidak semua lembaga/organisasi kemasyarakatan bersedia untuk mendukung penyelesaian masalah. Perbedaan kepentingan antara *in-group* dan *out group* mendorong untuk mencari jalan keluar yaitu melalui negosiasi dan mediasi.

**Ketiga**, faktor penghambat dalam melakukan strategi negosiasi dapat berasal dari sikap tidak menerima terhadap hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Faktor penghambat strategi Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi berdasarkan data hasil wawancara dengan informan penelitian berikut ini:

“...ya hambatan saat proses negosiasi itu ada beberapa individu yang benar-benar kekeh untuk dipindah secepatnya. ...”(Data Primer: Wawancara Imam Maliki 27 Februari 2020).

Lebih lanjut hambatan Komunitas Gusdurian dalam melakukan negosiasi adalah faktor masyarakat awam yang cenderung diam dan nurut.

“...the silent Majority adalah faktor penghambatnya. Menurut saya, orang-orang desa ini cenderung “*manut*” saja, ibaratnya mudah diarahkan sama orang yang megang mikrofon disitu...” (Data Primer: Wawancara Aan Anshori 7 Maret 2020).

Dalam hal ini bila dikaitkan dengan konsep ikatan kelompok *in-group* dan juga *out-group* dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser bahwa hambatan yang berasal dari kelompok *out-group* yaitu kelompok masyarakat dengan kelompok *in-group* yaitu Komunitas Gusdurian dapat dinegosiasikan dan dimediasikan sehingga hambatan dalam melakukan strategi negosiasi dapat diselesaikan dengan upaya negosiasi dan mediasi dengan hasil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pemaparan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan Komunitas Gusdurian dalam menjalankan strategi negosiasi adalah adanya sikap masyarakat yang kurang memahami akan persamaan derajat sesama manusia ditambah dengan adanya masyarakat awam yang mudah mengikuti arus.

## PEMBAHASAN

Adanya kasus penolakan makam yang terjadi pada warga non-muslim di Mojokerto ini dinilai oleh Komunitas Gusdurian bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan Gus-Dur khususnya pada nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Sehingga Komunitas Gusdurian hadir dengan pilihan-pilihan strategi yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan kasus penolakan makam warga non-muslim ini. Beberapa nilai yang tampak diimplementasikan oleh Komunitas Gusdurian dalam melakukan strategi mediasi penyelesaian kasus penolakan makam adalah Nilai Kesetiaan, Nilai Pembebasan, Nilai Keadilan dan Nilai Kearifan Tradisi.

Nilai Kesatria bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Nilai kesatria ditunjukkan oleh keberanian Komunitas Gusdurian dalam mengungkap kasus melalui sosial media *facebook* dan media massa dalam membangun opini publik.

Nilai Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Nilai Pembebasan nampak pada usaha Komunitas Gusdurian dengan menjalankan strategi membangun kerjasama dengan menghubungi aparat kepolisian untuk menjamin keadilan ditengah kondisi warga non-muslim sebagai warga minoritas dalam satu desa tersebut.

Nilai Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Nilai Persaudaraan muncul ketika Komunitas Gusdurian berinteraksi dengan pihak keluarga non-muslim untuk membela agar terjamin keadilan tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Nilai persaudaraan juga nampak pada saat Komunitas Gusdurian berkolaborasi dengan LBH Kontrass untuk menyelesaikan kasus penolakan makam ini.

Nilai Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat. Nilai keadilan tercermin pada saat pelaksanaan strategi negosiasi dimana Komunitas Gusdurian berusaha untuk memberikan saran yang adil yaitu memindahkan jenazah dengan membuatkan PERDES tentang TPU.

Nilai Kearifan Tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktek terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia di antaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD NRI 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Nilai Kearifan Tradisi tercermin dalam penyelesaian kasus penolakan makam ini melalui mediasi dan negosiasi. Artinya, Komunitas Gusdurian menekankan penyelesaian kasus penolakan makam ini dengan mengedepankan tradisi masyarakat yang biasa dilakukan untuk pemecahan masalah. Masyarakat desa pada umumnya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah dengan mediasi.

Strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi kasus penolakan makam warga non-muslim di desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Dengan menggunakan pendekatan Coser, penelitian ini berupaya

untuk mengidentifikasi fungsionalitas dari sebuah konflik yang berawal dari adanya kasus penolakan makam akibat perbedaan agama.

Dalam memahami suatu konflik, Coser memiliki beberapa konsep. Diantaranya yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Fungsi Konflik, (2) *Superordinate goals*, (3) Katup Penyelamat (*Safety Value*). Kemudian selanjutnya adalah (4) Jenis Konflik dan terakhir terkait (5) Ikatan Kelompok *in group* dan *out group*. Sehingga dengan menggunakan lima konsep gagasan konflik yang disusun oleh Lewis Coser ini dapat menganalisis strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya dapat dibuktikan dengan beberapa pernyataan informan-informan Komunitas Gusdurian pada indikator strategi melakukan negosiasi, dalam sub indikator menerima hasil keputusan pemerintah desa terkait pemindahan jenazah menuju TPU Desa, tanggapan antar pihak bahwasannya kasus penolakan makam yang terjadi atas adanya kelompok minoritas agama memiliki fungsi konflik yang positif. Hal ini dikarenakan dapat mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat termasuk halnya Komunitas Gusdurian untuk mencapai kesepakatan bersama melalui mediasi.

Hasil pemikiran Coser dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini benar, bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat menjadi sarana komunikasi untuk mengetahui kepentingan-kepentingan antar pihak yang bersengketa. Dengan demikian adanya kasus penolakan makam ini dapat menjadi konflik yang berfungsi positif yaitu tercapainya kesepakatan antar pihak yang menerima dengan lapang dada. Kesepakatan yang menjadi solusi terbaik adalah dengan pemindahan dan pembuatan TPU di tingkat desa sebagai hasil riil positif dari fungsi konflik.

Strategi Komunitas Gusdurian dalam membangun opini publik memiliki tujuan khusus yakni mendorong peran pemerintah untuk terlibat dalam upaya menjamin hak warga negara melalui strategi membangun opini publik yang dibangun dengan memanfaatkan media sosial dan media massa. Tujuan tertinggi yang dimiliki oleh komunitas gusdurian dalam memediasi kasus ini adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan HAM. Sehingga tindakan Komunitas Gusdurian dalam mencari dukungan melalui sosial media adalah tindakan dengan maksud membangun opini publik untuk mencapai tujuan tertinggi yakni jaminan atas hak warga negara secara adil. Dengan adanya tujuan yang jelas dapat menuntun Komunitas Gusdurian untuk memberikan usulan solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.

Menurut Coser Katup penyelamat adalah usaha untuk mencari jalan keluar. Dalam hal ini Coser menekankan

bahwasannya upaya jalan keluar yang baik adalah melalui pihak ketiga (mediator). Hal ini sesuai dengan penyelesaian kasus penolakan ini yang mengambil upaya mediasi sebagai jalan keluar. Dengan adanya mediasi yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, kepolisian bahkan komunitas gusdurian sebagai kelompok kepentingan juga terlibat dalam proses mediasi. Komunitas Gusdurian memngungkapkan kepentingan bahwasannya penyelesaian kasus ini apabila disetujui untuk dipindahkan maka pihak pemerintah memiliki konsekuensi untuk membuatkan TPU desa. Dengan demikian saran yang diberikan oleh pihak Komunitas Gusdurian dapat menjadi solusi yang disepakati sebagai jalan keluar.

Strategi membangun kerjasama dapat diidentifikasi bahwa jenis konflik dalam penelitian ini bila dikaitkan dengan konsep Coser kasus penolakan makam yang dilakukan oleh warga merupakan jenis konflik realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, yang di tujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.

Dalam kasus penolakan makam, beberapa warga yang melakukan penolakan berdemostrasi atas keputusan bapak kepala desa atas perizinan pemakaman. Konflik realistik muncul dari frustasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek frustasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu (*expectations of gains*). Tujuan beberapa orang melakukan penolakan adalah meminta untuk jenazah non muslim yang telah dimakamkan untuk segera dipindahkan. Untuk mengantisipasi akan hal ini Komunitas Gusdurian menjalankan strategi membangun kerjasama dengan menghubungi aparat kepolisian untuk menjaga keamanan ditengah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Faktor pendorong dan penghambat strategi Komunitas Gusdurian dalam mmediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim. Faktor pendorong dapat dianalisis sebagai ikatan kelompok *in group* dan faktor penghambat dapat dianalisis sebagai ikatan kelompok *out group*.

Faktor pendorong dalam penelitian ini adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam cara kerja Komunitas Gusdurian dan juga didukung oleh pihak keluarga yang kooperatif serta pihak kepolisian yang terbuka sehingga kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam *in group* akan bertambah tinggi apabila tingkat permusushan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Hal ini ditandai dengan dukungan dari

komunitas gusdurian semakin kuat ketika pihak warga yang berdemostrasi semakin memanas.

Dalam hal ini menurut Coser integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memeperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan tertentu. Coser menambahkan bahwa dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan, dan semakin tingginya tekanan pada konsesus dan konformitas. Dengan pendapat Coser diatas adanya kasus penolakan makam ini tidak menjadi sarana perpecahan dalam masyarakat melainkan justru mengarah pada upaya untuk meraih kesepakatan melalui mediasi.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam dapat dijelaskan melalui tiga pilihan strategi, yaitu, (a) strategi membangun opini publik meliputi membuat rilis bantuan dukungan terhadap nasib keluarga Kristen melalui media sosial *facebook* dan penyebarluasan berita melalui kolaborasi dengan media massa *online*; (b) strategi membangun kerjasama penyelesaian kasus meliputi upaya Komunitas Gusdurian menghubungi aparat kepolisian dan menjalin komunikasi dengan LBH Kontrass; (c) strategi melakukan negosiasi meliputi tawar-menawar kepentingan antara pihak keluarga non-muslim, pemerintah desa, tokoh agama Islam desa dan Komunitas Gusdurian, memberikan saran berupa membuat PERDES tentang TPU dan menerima hasil keputusan pemindahan jenazah di TPU Desa. Faktor internal yang mendorong Komunitas Gusdurian adalah sembilan nilai utama Gus Dur yang dijadikan pedoman dalam cara kerja Gusdurian. Faktorr eksternal yang mendorong adalah pihak keluarga yang kooperatif dan pihak kepolisian yang terbuka. Faktor penghambat berasal dari eksternal meliputi tindakan personal yang meminta Komunitas Gusdurian menghapus postingan di *facebook*, tidak semua organisasi kemasyarakatan bersedia bekerjasama dengan Komunitas Gusdurian.

Kedua, strategi Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam mendukung teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser mengenai fungsi positif dari adanya sebuah konflik. Dalam kasus ini, konflik yang terjadi antara kelompok mayoritas dan minoritas menghasilkan sebuah kesepakatan untuk dibuatkan TPU di tingkat desa dengan adanya PERDES. Melalui kasus ini menjadi rujukan usulan PERDA untuk menghimbau pemerintah desa di wilayah Mojokerto menyiapkan TPU di tingkat Desa.



Dapat disimpulkan bahwa konflik dapat memberikan sumbangsih untuk memperkuat sistem sosial.

### Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada masyarakat Desa Ngares Kidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mookerto bahwasannya dengan adanya keterlibatan Komunitas Gusdurian dalam memediasi penyelesaian kasus penolakan makam warga non-muslim dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk dapat menyerap nilai-nilai yang di implementasikan oleh Komunitas Gusdurian dalam meneruskan perjuangan Gus dur untuk senantiasa mengedepankan Sembilan nilai utama Gus Dur yaitu Nilai Ketauhidan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Keadilan, Nilai Kesetaraan, Nilai Pembebasan, Nilai Persaudaraan, Nilai Kesederhanaan, Nilai Kesatria dan Nilai Keasrifan Tradisi dalam kehidupan bermasyarakat.

Saran selanjutnya ditujukan kepada masyarakat umum di seluruh Indonesia yakni perlu dan pentingnya peran aktif semua masyarakat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia menjunjung prinsip Bhineka Tunggal Ika dalam menjalani hidup ditengah perbedaan. Peran aktif dari seluruh masyarakat untuk mengedepankan semangat persatuan dengan sikap penuh toleransi, saling menghargai dan menghindari tindakan diskriminasi. Serta peran aktif dalam membela dan mengentaskan tindakan intoleransi dengan mengedepankan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi. 2019. Komitmen Anggota Jaringan Gusdurian Surabaya Terhadap Politik Kebangsaan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 7 No 2 Hal 526-540
- Burhani Najib Ahmad. 2019. *Memahami Minoritas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Creswell J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara Lima Pendekatan)*. Cetakan 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- CNN. 2019. Jenazah Ditolak Warga Keluarga Tunggu Ada Makam Non-Muslim. Sumber berita: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190221083152-20-371289/jenazah-ditolak-warga-keluarga-tunggu-ada-makam-non-muslim>
- Detik.com. 2019. Beda Keyakinan Makam Seorang Warga Di Mojokerto Harus Di Relokasi. Sumber Berita: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4438034/beda-keyakinan-makam-seorang-warga-di-mojokerto-harus-direlokasi>
- Dhahir Darman Fauzan. 2019. Citra Indonesia Dalam Propaganda: Kasus Penyerangan Terhadap Warga Sipil di Kabupaten Nduga. *Jurnal Komunikasi dan Opini Publik*. Vol 23 No. 62 Hal: 143-158
- Digdoyo.2018. Kajian Isu Toleransi Beragama, Budaya dan Tanggung Jawab Sosial Media. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 3 No.1 Hal: 42-60
- Fadhli. 2014. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Vol 11 No.2 Hal 353-370
- Faktualnews.com.2019. Hanya Karena Beda Agama Seorang Perempuan Di Mojokerto Bakal Dibongkar. <https://faktualnews.co/2019/02/21/hanya-karena-beda-agama-makam-seorang-perempuan-di-mojokerto-bakal-dibongkar/125164/>
- Farida Rizka. 2016. Strategi Eksistensi Komunitas Jaringan Gusdurian Jombang. *Jurnal AntroDotUnair*. Vol 5 No.1 Hal : 123-136
- Ritzer George dan Douglass J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup
- Gusdurian. 2019. *Mengelola Komunitas Gusdurian* Yogyakarta: Sekretariat Nasional Gusdurian
- Haq Saiful Muhammad. 2016. Motivasi Mempromosikan Kerukunan Umat Beragama Studi Fenomenologi Komunitas Gusdurian Malang. Skripsi. Jurusan Psikologi. Fakultas Psikologi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Indiyanto, Agus. 2013. *Agama di Indonesia dalam Angka: Dinamika Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk 2000 dan 2010*. Yogyakarta: CRCS
- Jamil. 2007. *Mengelola konflik membangun damai: teori, strategi dan implementasi resolusi konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC).
- Muawanah.2018. Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran Di Masyarakat. *Jurnal Vijjacariya*. Vol 5 No. 1 Hal: 57-70
- Musa, Ali Masykur. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga
- Parmitasari Indah. 2019. Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak. *Jurnal Untidar*. Vol 3 No. 2 Hal: 50-63
- Putra. 2009. *Meretas perdamaian dalam konflik pilkada langsung*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri. 2018. Implementasi Nilai-nilai Multikultural oleh Jaringan Gusdurian Pada Masyarakat Surabaya.

*Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 6  
No 1 Jilid 1 Hal 121-135

Postingan Facebook Gusdurian Mojokerto pada 19 Februari 2019 terkait kasus penolakan makam warga non-muslim desa Ngares Kidul Gedeg Mojokerto(<https://www.facebook.com/GusdurianMojokerto/posts/10217889473899441>). Diakses pada 31 Oktober 2019

Riuh Beranda Satu. 2003. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

Rumagit Stev Koresy.2013. Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. Vol1 No.2 Hal: 56-64

Sarkadi, dkk. 2019. Analisis Kerangka Kewarganegaraan Digital: Kiprah Jaringan Gusdurian Di Media Sosial. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol 4 No 1 Hal: 8-14

Setiawan Albert Tito. 2018. Implementasi Strategi Komunitas Gusdurian Surabaya dalam menanamkan Sikap Toleransi. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol 6 No. 2 Jilid 2 Hal 459-473

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta

VOAIndonesia.com.2019.Selesaikan Polemik Pemda Mojokerto Sediakan Makam Khusus Warga Non-Muslim.<https://www.voaindonesia.com/a/selesaikan-polemik-pemda-mojokerto-sediakan-makam-khusus-warga-non-muslim-sebelumdipindah/4799589.html>

